

ABSTRAK

Ulfa Maulidiyah Rahmah (2024) Urgensi Pengaturan *Marital Rape* Dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Keharmonisan Keluarga ” Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam (KHI) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing Dr. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.H.I Dan Dr. Hj. Eka Susylawati, SH. M.Hum

Kata Kunci: Urgensi, Marital Rape, dan Keharmonisan Keluarga

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pasal 473 ayat 1 dan 6 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyebutkan tentang perkosaan dalam perkawinan atau *marital rape*, yang secara mendasar dapat dipidanakan dengan pidana 12 tahun. Peneliti melihat penting melakukan suatu kajian teoritis terhadap Marital Rape dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama berkaitan dengan Marital Rape dan keharmonisan keluarga.

Konteks penelitian di atas mengantarkan pemikiran peneliti untuk memberikan fokus penelitian, yaitu (1) Bagaimana Pengaturan *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana? (2) Bagaimana Urgensi Pengaturan *Marital Rape* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Terhadap Keharmonisan Keluarga?

Untuk melakukan analisa dalam Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) , Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan Sejarah (*historical approach*) adapun tehnik pengumpulan datanya melalui *library research*, dan Studi dukomen.

Dari hasil penelitian yang di peroleh peneliti, *Pertama* Tindak pidana marital rape merupakan tindak pidana dengan delik aduan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 473 ayat 1 dan ayat 6 KUHP Baru yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 belas tahun. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan korban”. Yang artinya jika tidak aduan maka tindak pidana tersebut dianggap tidak ada. *Kedua* Pengaturan marital rape ini sangat penting yakni sebagai peringatan dan batas bagi suami istri dalam hal melakukan hubungan seksual dilakukan dengan cara yang baik seperti adanya persetujuan dan kesukarelan, tanpa melibatkan kekerasan dan paksaan, karena tindakan marital rape ini memiliki dampak yang negative yakni

dampak medis, dampak psikis dan dampak terhadap keharmonisan serta keutuhan keluarga. Sehingga ancaman dampak dari tindakan ini adalah ketidakharmonisan keluarga yang dibinanya.

ABSTRACT

Ulfa Maulidiyah Rahmah (2024) *The Urgency of Marital Rape Regulation in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Against Family Harmony* Thesis of the Islamic Family Law Study Program (KHI) Postgraduate IAIN Madura, Supervisor Dr. Abdul Mukti Thabrani, Lc. M.H.I and Dr. Hj. Eka Susylawati, SH. M.Hum

Keywords: Urgency, Marital Rape, and Family Harmony

This research is motivated by the existence of Article 473 paragraph 1 and 6 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which states about rape in marriage or marital rape, which basically can be punished with a sentence of 12 years. The researcher sees the importance of conducting a theoretical study of Marital Rape in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially regarding Marital Rape and family harmony.

The research context above leads the researcher's thoughts to provide a research focus, namely (1) How is the Regulation of Marital Rape in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code? (2) How Urgent is the Regulation of Marital Rape in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code for Family Harmony?

To conduct the analysis in this research, normative legal research is used. By using the statute approach, conceptual approach and historical approach, the data collection techniques are through library research and documentary studies.

From the research results obtained by the researcher, First, the crime of marital rape is a crime with a complaint offense, this can be seen in Article 473 paragraph 1 and paragraph 6 of the New Criminal Code which states that "any person who intentionally uses violence and threats of violence to force someone to have sex with him, shall be punished for committing rape with a maximum imprisonment of 12 years. In the case of a crime as referred to in paragraph 1 committed in a marriage bond, no prosecution shall be carried out except upon complaint from the victim". Which means that if there is no complaint, the crime is considered non-existent. Second, the regulation of marital rape is very important, namely as a warning and limit for husband and wife in terms of having sexual relations carried out in a manner that is like there is agreement and willingness, without involving violence and coercion, because this act of marital rape has negative impacts, namely medical impacts, psychological impacts and impacts on family harmony and integrity. So that the threat of impact from this action is disharmony in the family that is being built.